

B u l e t i n



PARLEMENTARIA

Tinjau Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**KETUA
Tindak Tegas
Beras Oplosan!**

**PARIPURNA
Pembahasan
RUU KUHP
Masih Berjalan**

Nomor 1352/III/VII/2025 Juli 2025



9 772614 339005



Tinjau Keselamatan dan Kesehatan Kerja



FOTO: UF/AHA

Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke PT Mitra Adi Jaya (MAJ), Sleman, Kamis (17/7/2025).

Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh sektor industri, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke PT Mitra Adi Jaya (MAJ), Sleman, Kamis (17/7).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX meninjau langsung fasilitas produksi dan operasional PT MAJ untuk memastikan penerapan prosedur keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Charles menyebut pentingnya komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan para pekerja, bukan sekadar demi kepatuhan administratif, tetapi sebagai budaya kerja yang melekat sehari-hari.

“Kami melihat langsung bagaimana perusahaan menerapkan standar keselamatan kerja dan bagaimana prosedur penanganan dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Kami mengingatkan bahwa

ini tidak boleh hanya dilakukan saat ada kunjungan, tapi harus menjadi kebiasaan dan tanggung jawab berkelanjutan,” ujar Charles.

Komisi IX menilai perlindungan tenaga kerja harus dimulai dari pencegahan melalui pelatihan rutin, penyediaan alat pelindung diri (APD), serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas di setiap lini produksi.

Lebih lanjut, Charles menegaskan bahwa pengawasan dan pelaksanaan K3 bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga pemerintah daerah. “Kami berharap pemerintah daerah bisa terus memantau dan mendampingi pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan, termasuk K3, agar perlindungan terhadap pekerja tidak hanya bersifat formalitas, tapi benar-benar berdampak bagi keselamatan mereka di tempat kerja,” tegasnya. —uf/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Tindak Tegas Beras Oplosan



FOTO: ENO/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya pengusutan tuntas terhadap kasus beras oplosan yang belakangan mencuat dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan 212 merek beras medium dan premium diduga oplosan. Merek-merek itu setidaknya tersebar di 10 provinsi.

“Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” tegas Puan di hadapan awak media Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Kasus beras oplosan ini mengemuka setelah aparat penegak

hukum mengungkap praktik pencampuran beras impor dengan beras medium lokal di sejumlah gudang distribusi di wilayah Jabodetabek. Beras campuran tersebut kemudian dikemas ulang dan dijual dengan harga premium, padahal kualitasnya jauh di bawah standar. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan besar di tengah tingginya permintaan beras.

Puan menyatakan bahwa pihak-pihak yang terbukti terlibat harus segera diproses secara hukum. Ia menekankan bahwa praktik curang ini sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok.

we/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnuurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puritno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno P.D., Moernoponi, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhammad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



FOTO: ENO/AYM

Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Pembahasan RUU KUHAP Masih Berjalan

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih terus berjalan di DPR RI. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

“Terkait dengan (RUU) KUHAP, DPR tentu saja sampai saat ini masih

melakukan proses pembahasan. Dan kami melakukan pembahasan tersebut secara terbuka,” ujar Puan kepada para wartawan.

Ia menjelaskan bahwa DPR telah dan terus melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan dan pembahasan revisi KUHAP, baik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurutnya, proses ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut instrumen hukum yang krusial dan berdampak

langsung pada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. “Kami mengundang pihak-pihak yang memang kami harus lakukan bersama-sama untuk bisa melakukan pembahasan tersebut,” imbuh Puan.

Menanggapi isu bahwa pembahasan RUU KUHAP terkesan tertutup atau belum diumumkan ke publik, Puan menegaskan bahwa hal tersebut terjadi semata-mata karena prosesnya memang masih berlangsung dan belum sampai pada tahap penyampaian resmi ke publik secara menyeluruh.

“Kalau kemudian belum dibuka ataupun terbuka, karena memang sampai saat ini proses tersebut masih dilakukan. Melakukan RDPU dan RDP untuk kemudian meminta masukan dari semua pihak yang ada, di seluruh elemen masyarakat,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. **we/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: MUNCHEN/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Pemilu Harus Sesuai UUD

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh partai politik di DPR memiliki sikap yang sama dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait

terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Hal ini disampaikan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,

Selasa (15/7).

“Terkait dengan putusan MK, semua partai politik mempunyai sikap yang sama bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama 5 tahun,” ujar Puan di hadapan wartawan.

Puan menyebutkan bahwa putusan MK yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dasar tentang masa pemilu perlu dikaji secara serius. Menurutnya, penyelenggaraan pemilihan umum lima tahunan merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. “Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MK, menurut Undang-Undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” tegasnya.

Meski begitu, Puan menambahkan bahwa respons atas putusan tersebut akan dilakukan secara konstitusional sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga dan partai politik. Ia menekankan bahwa proses pengambilan sikap akan dilakukan dalam kerangka hukum dan tata negara yang berlaku.

“Jadi nanti pada saatnya, kami semua partai politik itu saja, sesuai dengan kewenangannya, akan menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami,” pungkas Puan. **we/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



APBN 2024 Berhasil Jadi Peredam Krisis



FOTO: JAKA/ANDRI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah berfungsi optimal sebagai peredam krisis (*shock absorber*) di tengah gejala ekonomi dan geopolitik global yang memuncak sepanjang tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meski Indonesia sempat menghadapi tekanan berat pada paruh pertama 2024, stabilitas ekonomi berhasil dijaga hingga akhir tahun.

"APBN kita menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat dan menopang daya beli saat harga pangan melonjak dan pasar keuangan terguncang," ujar Sri Mulyani saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV

Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Menurutnya, awal tahun 2024 diwarnai ketegangan geopolitik seperti konflik di Ukraina, Timur

Tengah, dan rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok, serta Rusia. Ditambah lagi, paparnya, dengan efek lanjutan El Nino, kondisi ini semakin mengerek harga minyak mentah dunia hingga USD91,2 per barel sekaligus menyebabkan inflasi pangan menembus 10,3 persen pada Maret 2024.

Lalu, situasi global tersebut turut memukul ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi ke Rp16.486 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke titik terendah 6.726,9. Pendapatan negara juga berkontraksi 6,2 persen secara tahunan pada semester I 2024.

Namun di tengah tekanan itu, belanja negara justru tumbuh 11,3 persen. Pemerintah menggelontorkan dana untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), bantuan mitigasi risiko pangan, serta stimulus ekonomi. Strategi ini dianggap berhasil menjaga daya beli dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat. **um/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Kunci Hadapi Geopolitik Kian Dinamis

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin dinamis. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi I ke Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/7).

Menurut Andina, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kemampuan negosiasi dan diplomasi pertahanan yang mumpuni. "Dengan keadaan geopolitik saat ini yang sangat dinamis, kita

membutuhkan generasi muda yang unggul dalam negosiasi dan diplomasi. Mereka adalah garda terdepan yang harus kita siapkan untuk menjaga kepentingan nasional," tegasnya.

Andina juga menyoroti pentingnya Unhan sebagai institusi

pendidikan pertahanan untuk mengambil peran lebih strategis. Ia mengapresiasi adanya program studi khusus Diplomasi Pertahanan yang diharapkan dapat mencetak kader bangsa yang cakap di level internasional.

"Saya tadi melihat dalam paparan Pak Rektor ada nama mahasiswa dari Prodi Diplomasi Pertahanan. Ini sangat baik, namun bagaimana Unhan memastikan bahwa lulusan-lulusannya memiliki kemampuan diplomasi yang sesuai tantangan zaman, itu yang harus kita kawal bersama," ujar legislator dapil Kalimantan Tengah itu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sebagai negara non-blok dengan prinsip politik bebas aktif, Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas generasi mudanya dalam bidang pertahanan dan hubungan internasional.

"Negara kita tidak berpihak kepada kekuatan manapun, tapi justru karena itu, kita harus punya SDM yang mampu bernegosiasi dengan siapa saja untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia," pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. — **eno/rdn**

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, saat kunjungan kerja Komisi I ke Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/07/2025).

FOTO: KRESNO/VEL



Dukung Perluasan Wilayah Kota Gorontalo

Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyatakan dukungannya terhadap wacana perluasan wilayah Kota Gorontalo selama ada kesepakatan antara pemerintah daerah yang terkait. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Gorontalo, Kamis (17/7).

Longki menjelaskan bahwa Gubernur Gorontalo telah menyampaikan aspirasi mengenai keterbatasan

luas wilayah Kota Gorontalo yang saat ini hanya sekitar 7 kilometer radius. Dalam pandangannya, jika memang perluasan itu dibutuhkan dan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, maka tidak ada hambatan selama prosesnya

ditempuh melalui mekanisme yang tepat.

“Pak Gubernur minta untuk ibu kota provinsi, Kota Gorontalo itu kalau boleh diperluas. Sementara kota Gorontalo itu terbatas, hanya 7 km kalau tidak salah. Saya kira tidak ada masalah,” ujar Longki pada **Parlementaria**.

Ia menekankan pentingnya dialog internal antar kepala daerah sebagai langkah awal sebelum usulan tersebut dibawa ke tingkat pusat. “Cukup dibicarakan secara internal dulu oleh Pak Gubernur yang memediasi sebagai kepala wilayah. Kemudian undang Bupati Gorontalo dan Wali Kota Gorontalo. Dibicarakan, Kota Gorontalo butuh berapa lagi wilayahnya, seperti apa,” katanya.

Menurut Longki, selama ada persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan masyarakatnya, usulan perluasan wilayah Kota Gorontalo dapat diformalkan dan dibawa ke DPR RI untuk dibahas dalam pembentukan atau revisi undang-undang. “Nanti setelah ada persetujuan bersama, itu dibawa ke DPR untuk kita putuskan di undang-undang nanti bersama-sama. Kalau bisa seperti itu,” pungkasnya. **we/aha**

Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Gorontalo, Kamis (17/7/2025).

FOTO: WILGA/VEL



Hinca Desak Perlindungan Advokat

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menyampaikan dukungan kuat terhadap profesi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat adat pemilik tanah di Kupang NTT beserta kuasa hukumnya Adv Fransisco Bernando Bessi, dan Solidaritas Advokat untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi selaku Kuasa Hukum Adv Tony Budidjaja, yang membahas tentang revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hinca menegaskan bahwa advokat merupakan satu-satunya kekuatan dan jawaban bagi warga negara untuk menghadapi ketimpangan kuasa negara dalam sistem peradilan pidana. "Satu-satunya jawaban bagi warga negara untuk menghadapi ketimpangan aparat penegak hukum yang sangat

berkuasa dengan warga negara yang tidak memiliki kuasa adalah advokat," ujarnya, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut Hinca, setiap warga negara memiliki kedaulatannya masing-masing sejak negara ini didirikan. Namun, warga negara tetap tidak bisa mengerjakan beberapa hal seperti membangun infrastruktur publik sendiri. Warga negara harus menyerahkan kedaulatannya kepada negara walau hanya sebagian saja.

Untuk itu, berkaca dari kasus yang dialami Tony Budidjaja, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengajak dan memperingatkan semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang. "Kita tidak ingin ada lagi Tony yang lain setelah KUHP ini direvisi," tegasnya.

Hinca berharap agar pemerintah dan Mahkamah Agung melindungi



profesi advokat agar mereka bisa menjalankan amanat konstitusi dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pembelaan hukum yang adil dengan baik. "Saya kira hadiah terbaik untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini adalah apabila advokat merdeka menjalankan profesinya," ujar Hinca.

tsy,bia/aha



Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, dalam foto bersama usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat adat pemilik tanah di Kupang NTT, di Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).



Kondisi TWA Punt Kayu Tak Terawat

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Taman Wisata Alam (TWA) Punt Kayu, Palembang, Sumatera Selatan. Alex selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, menemukan bahwa kawasan konservasi yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan rekreasi masyarakat, kini berada dalam kondisi tidak layak.

“Ya, kami sudah meninjau lokasinya langsung ya. Kami sangat prihatin sekali dengan kondisi taman wisata alam tersebut. Taman wisata alam tersebut selain tidak terawat, fasilitasnya juga sangat minim dan keadaan yang tidak

layak sama sekali,” kata Alex kepada **Parlementaria** usai memimpin pertemuan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (18/07).

Selain persoalan kondisi fisik TWA, Komisi IV juga menyoroti

Kami sangat prihatin sekali dengan kondisi taman wisata alam tersebut. Taman wisata alam tersebut selain tidak terawat, fasilitasnya juga sangat minim dan keadaan yang tidak layak sama sekali

dugaan ketidakpatuhan dalam pengelolaan administratif oleh pihak pengelola TWA. Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, terungkap adanya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum diselesaikan oleh pengelola taman.

“Dari laporan Bapak Kepala BKSDA, kita juga menemui bahwa pihak pengelola ini juga sudah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya, menunggak PNBP sampai harus BKSDA meminta aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk menagih tunggakan PNBP-nya,” ungkap Alex.

Komisi IV mendesak Kemenhut melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas pengelolaan TWA Punt Kayu. Komisi IV juga meminta laporan tertulis sebagai dasar pembahasan dalam rapat kerja lanjutan bersama kementerian. — **mun/rdn**



FOTO: MUNICHEN/VEL

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman bersama tim kunsfik Komisi IV DPR RI tinjau kondisi TWA Punt Kayu, serta Wakil Walikota Prima Salam dan Pengelola TWA Punt Kayu Raden Azka, Palembang, Sumsel, hari Jumat(18/07/2025).



Program BSPS Bagi Masyarakat



FOTO: OJI/ANDRI

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat rapat kerja Komisi V dengan PKP di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengapresiasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Menurutnya, di Indonesia ini kawasan kumuh masih banyak, yang tersebar di beberapa titik seperti pesisir pantai, bahkan di kawasan perkotaan, masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni.

“Ini perlu mendapat perhatian serius dan Pak Menteri PKP ini merespon dengan baik soal ini,” ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V dengan PKP di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Dijelaskannya, dalam Undang-Undang 1945 jelas disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dibiayai oleh negara.

Jadi peran negara dalam menata kehidupan, menata masyarakat, termasuk memberikan kediaman atau rumah yang layak huni bagi masyarakat tidak mampu merupakan tantangan bagi pemerintah dan DPR RI dalam hal ini.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait

mengungkapkan anggaran Kementerian perumahan dan kawasan permukiman diusulkan sebesar 49,854 triliun. Sehingga dari Pagu indikatif sebesar 1,824 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar 48,028 triliun. Dari usulan tersebut sebesar 45, 55 triliun atau 91, 37 Persen diusulkan untuk anggaran BSPS, dengan target 2 juta unit.

Usulan anggaran tersebut dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sesuai target, dan prioritas RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2025 - 2029 dengan

Dalam Undang-Undang 1945 jelas disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dibiayai oleh negara. Jadi peran negara dalam menata kehidupan, menata masyarakat, termasuk memberikan kediaman atau rumah yang layak huni bagi masyarakat tidak mampu

rencana kerja pemerintah tahun 2026. **ayu/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Prioritas Nasional di Tengah Tarif Trump

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menekankan agar Pemerintah memprioritaskan kepentingan nasional sebagai prioritas utama untuk menyikapi dinamika perdagangan global. Sebab itu, ucapnya, Pemerintah perlu lebih cermat mengantisipasi

dampak kebijakan dagang negara-negara besar, mulai dari tarif tinggi era Trump hingga perubahan lanskap akibat BRICS dan tren deglobalisasi yang makin nyata.

Terkait tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat, dirinya memuji capaian pemerintah yang berhasil menurunkan tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika

Serikat menjadi 19 persen pasca negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump. Langkah ini, menurutnya, menjadi nafas baru bagi para eksportir, terutama pelaku UMKM dan industri kerajinan Bali yang banyak bergantung pada pasar Amerika.

“Ini prestasi. Tadinya teman-teman di Bali, terutama ASPH, sudah mulai deg-degan karena ekspor ke Amerika cukup besar, khususnya barang-barang seni. Hampir semua orang yang sudah sejahtera sedikit pasti mau punya barang seni, dan banyak asalnya dari Bali,” kata Demer, sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Meski demikian, legislator dari Bali itu mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak berpuas diri. Bagianya, tantangan tidak berhenti pada kebijakan Amerika Serikat. Dengan kemunculan blok-blok ekonomi baru seperti BRICS, serta intensnya perang dagang Amerika dengan Cina dan Rusia, jelasnya, ia mendorong agar hasil pertemuan Indonesia dengan BRICS serta Indonesia dengan ASEAN bisa segera diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis di tingkat kementerian.

“Jangan sampai lawatan puluhan jam Pak Presiden ke luar negeri hanya berhenti jadi *headline*, tapi tidak terimplantasikan di kementerian. Kalau tidak, yang gagal bukan Pak Prabowo, tapi kita di bawah ini yang tak mengeksekusi,” tegasnya. [um/rdn](#)

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).



FOTO: FARHAN/VEL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Harus Inklusif dan Pro-Komunitas



Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah dalam pertemuan bersama pengelola KEK dan pemerintah daerah di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke KEK Singhasari, Malang, Jawa Timur, Selasa (15/7/2025).

Legislator Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya memastikan agar ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang, Jawa Timur, bersifat inklusif. Tak hanya itu, penting bagi KEK untuk mampu menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, khususnya generasi muda dari berbagai komunitas.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah dalam pertemuan bersama pengelola KEK, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi kreatif lokal, Selasa (15/7), di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke kawasan tersebut. “Kita ingin

memastikan bahwa kreativitas dan fasilitas yang ada di KEK ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Harus bisa masuk ke berbagai komunitas masyarakat, agar pemerataan manfaatnya nyata,” ujar Siti.

Politisi Fraksi PKB tersebut menilai bahwa pengembangan KEK Singhasari tidak boleh lepas dari semangat pembangunan sosial. Menurutnya, penting untuk menjadikan kawasan ini sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi anak muda dari berbagai latar belakang sosial dan daerah.

“Ekonomi kreatif harus jadi milik bersama, bukan hanya untuk mereka yang punya akses. Anak-anak muda dari berbagai daerah dan latar belakang sosial harus diberi ruang agar kita benar-benar menyiapkan Indonesia 2045 dengan adil,” tegasnya.

Siti juga mengingatkan agar ekosistem kreatif yang dibangun tidak semata mengejar inovasi dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Ia mengapresiasi adanya pengembangan animasi dan tren industri digital di KEK, namun mengingatkan agar nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta karakter bangsa tetap dijaga. **aha**



Potensi Kecemburuan di Sekolah Rakyat

Komisi VIII DPR RI meninjau Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai salah satu model pendidikan inklusif berasrama yang digagas Kementerian Sosial. Dalam tinjauannya, ada beberapa sejumlah catatan penting demi keberhasilan

program ini sebagai solusi memutus rantai kemiskinan.

“Saya melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara serius, Yang pertama adalah soal DTKS-M (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Mutakhir). Jangan sampai penetapan data yang tidak akurat justru menimbulkan kecemburuan sosial di tengah

masyarakat,” Anggota Komisi VIII DPR RI ujar Atalia Praratya dalam keterangannya kepada **Parlementaria** usai kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/7).

Ia mengingatkan bahwa keunggulan fasilitas dan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat justru bisa memicu asumsi negatif jika tidak dibarengi dengan seleksi penerima manfaat yang transparan dan tepat sasaran. “Sekolah ini luar biasa bagusnya. Jangan sampai

DTKS-M (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Mutakhir). Jangan sampai penetapan data yang tidak akurat justru menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat

masyarakat berpikir lebih baik pura-pura miskin agar bisa masuk ke sekolah dengan fasilitas unggulan seperti ini,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan pendamping sosial dan wali siswa yang berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak-anak di Sekolah Rakyat, terutama di tingkat dasar. “Anak-anak kelas 1 sampai 4 SD itu masih sangat membutuhkan figur pengasuh dan pendamping. Mereka tidak cukup hanya diberi fasilitas, tapi juga butuh perhatian emosional dan penguatan karakter,” ujarnya.

 **upi/rdn**

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya saat kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/07/2025).



FOTO: ULFI/VEL

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi IX Dorong Penguatan Budaya K3 di Solo



sinergi antara perusahaan, pekerja, asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, dan serikat buruh untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Diharapkan kunjungan kerja spesifik Komisi IX menjadi sarana untuk mendengar langsung berbagai tantangan dan praktik K3 khususnya di solo.

Putih Sari menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan PT. Sari Warna Asli Garment dalam menjalankan program-program K3. Namun demikian, ia mendorong agar K3 tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian integral dari budaya perusahaan.

"Kami ingin agar praktik K3 menjadi nilai yang hidup dalam proses bisnis. Bukan hanya memenuhi standar minimum, tetapi melekat dalam setiap kegiatan operasional perusahaan," pungkasnya. **afr/aha**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengatakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, dengan agenda utama meninjau pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri. Dalam Kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI difokuskan pada PT. Sari Warna Asli Garment sebagai salah satu perusahaan tekstil besar di solo

Putih Sari menegaskan bahwa Komisi IX, sebagai mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki tanggung jawab legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya dalam memastikan regulasi dan kebijakan K3 berjalan efektif. "Kami berharap seluruh perusahaan di wilayah Kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah mematuhi aturan K3 kepatuhan ini bukan hanya untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja, tapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan," terang Putih Sari di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (17/7).

Politisi Fraksi Partai Gerindra juga menekankan pentingnya



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, bersama tim saat kunjungan ke PT. Sari Warna Asli Garment sebagai salah satu perusahaan tekstil besar di Solo.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Minta Perpustnas Tambah Jumlah Pustakawan

Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memiliki langkah strategis dalam pemenuhan kekurangan pustakawan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijaya dalam Rapat Kerja dengan Kepala Perpustnas RI, di Gedung DPR, Kamis (17/7).

Ia mengatakan Perpustnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan pustakawan. "Sebaiknya ada formasi yang diajukan untuk jabatan pustakawan dalam rekrutment casn, jangan sampai pustawan saat ini hanya bersifat sementara," imbuh Politisi PDI-Perjuangan ini.

Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, ia meminta adanya alokasi anggaran agar pengelola perpustakaan memiliki penghasilan yang lebih layak. Ia menambahkan jumlah pustakawan yang memadai juga akan mendorong meningkatkan literasi membaca masyarakat, sebab saat ini literasi membaca Indonesia masih jauh dibawah standar.

"Terbukti dengan tempat yang nyaman dan pustakawan yang memadai akan menjadi pendorong minat masyarakat untuk membaca sehingga literasi membaca

Indonesia semakin meningkat," imbuhnya.

Menurutnya literasi membaca merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Tingkat gemar membaca yang tinggi juga mendorong pembangunan bangsa secara keseluruhan. Seluruh

kompetensi pustakawan harus ditingkatkan serta diberdayakan. Ia menilai pustakawan juga sebagai salah satu unsur pendukung yang tak terlepas dalam upaya pengembangan mutu pendidikan.

Ia mendorong adanya program pelatihan pada setiap pustakawan yang ditugaskan termasuk di sekolah. Dengan pelatihan tingkat dasar, pustakawan diharapkan mampu melaksanakan tugas

kepustakawanan yang punya ilmu pengelolaan perpustakaan.

— **tn/aha**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijaya dalam Rapat Kerja dengan Kepala Perpustnas RI, di Gedung DPR, Kamis (17/7/2025).



FOTO: MUNCHEN/VEL

Pengelolaan Anggaran Harus Transparan



Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, saat memimpin rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, membuka rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta itu, Misbakhun menegaskan pentingnya pembahasan anggaran secara menyeluruh dan terarah demi mendukung penyusunan APBN yang lebih tepat sasaran.

“Rapat kerja hari ini akan membahas agenda utamanya, yaitu membahas rencana kerja dan anggaran serta RKP untuk tahun anggaran 2026,” ujar Misbakhun saat membuka rapat, Senin

(14/7). Ia menjelaskan bahwa RKA merupakan dokumen perencanaan

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan, serta pembiayaan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBN bagi kementerian atau lembaga.

Misbakhun menyampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR, sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran nasional. Dalam dokumen tersebut, lanjutnya, Kementerian Keuangan mengusulkan rencana anggaran sebesar Rp47,132 triliun untuk tahun anggaran 2026.

“Adapun rinciannya, program dukungan manajemen sebesar Rp45,485 triliun, kemudian program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp1,460 triliun, dan program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp186,5 miliar,” kata Misbakhun. Ia juga menambahkan bahwa dua program lainnya, yaitu kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara, masih belum mencantumkan alokasi anggaran secara rinci. **we/rdn**



Percepat Lifting dan Swasembada Energi



FOTO: ESTU/VEL

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian dalam rapat kerja bersama mitra migas yang digelar di Hotel Westin, Surabaya, Kamis (17/7/2025).

Komisi XII DPR RI kembali menekankan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang

Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) agar mampu menjawab tantangan praktis di sektor energi nasional. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian dalam rapat kerja bersama mitra migas yang digelar di Hotel Westin, Surabaya, Kamis (17/7).

Ramson menyampaikan bahwa upaya merevisi UU Migas telah gagal dilakukan dalam beberapa periode DPR sebelumnya. Ia menegaskan perlunya langkah konkret dan

sinergi antarlembaga pemerintah agar revisi ke depan tidak sekadar

menjadi retorika politik.

“Untuk periode ini, saya mengharapkan agar pemerintah yang mengajukan usul kepada DPR RI dengan mensinergikan semua kekuatan dan institusi yang ada,” jelas Ramson.

Ia mendorong agar kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, KLHK, SKK Migas, Pertamina, dan para kontraktor K3S mengumpulkan data, hambatan, serta kebutuhan sektor energi secara komprehensif. Dengan demikian, regulasi baru dapat benar-benar *applicable* dan mendorong percepatan eksplorasi serta produksi energi nasional.

“Kalau hanya retorika, tentu tidak akan berdampak pada peningkatan lifting atau produksi minyak. Revisi ini harus praktis dan mampu mempercepat peningkatan produksi minyak nasional,” tegasnya.

Ramson juga menyoroti kesenjangan antara konsumsi dan produksi minyak saat ini. “Kita masih mengonsumsi sekitar 1,5 juta barel per hari, tapi produksi kita hanya 600 ribu. Perbedaannya terlalu jauh. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor. Oleh karena itu, revisi UU Migas menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.

est/aha



Scan QR untuk berita selengkapannya



Segera Inventarisasi Aset Instansi Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya pengelolaan aset negara secara lebih serius dan menyeluruh. Ia mendorong agar seluruh aset yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) segera diinventarisasi kembali demi optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pemanfaatan sosial.

“Saya ingin meminta kepada jajaran Setneg ini untuk menginventarisasi kembali,

menyisir kembali aset-aset negara yang itu bisa digunakan, baik sebagai penerimaan negara bukan pajak atau untuk program-program kerakyatan Bapak Prabowo yang lain,” ujar Yanuar dalam Rapat Kerja dengan Mensesneg, membahas Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

Politisi Fraksi PKS itu mencontohkan kebutuhannya saat masih duduk di Komisi V DPR RI, ketika pemerintah mencari lahan untuk pembangunan 3 juta rumah

rakyat. Menurutnya, aset negara yang terbengkalai atau bahkan diduduki tanpa dasar hukum harus segera diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi beban negara.

“Masih banyak, Pak, kami dengar itu aset-aset negara yang terbengkalai. Bahkan dalam tanda petik diserobot, digunakan menahun, tidak ada tindakan, sehingga orang yang tadinya hanya tinggal kemudian merasa memiliki,” katanya.

Selain soal aset, Yanuar juga menyoroti penggunaan perangkat lunak ilegal oleh instansi pemerintah maupun BUMN. Ia menyebut praktik ini sebagai ironi, mengingat pemerintah semestinya menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum dan regulasi.

“Saya dapat masukan tentang penggunaan *software* bajakan di instansi pemerintah dan BUMN kita. Tentu ini ironi. Saya berharap dari Sekretariat Negara bukan hanya sekedar himbauan, tapi

benar-benar menekankan kepada seluruh kementerian dan BUMN untuk tidak menggunakan *software* bajakan,” tegasnya.

— gal/aha

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo saat rapat kerja dengan Mensesneg, Senayan, Kamis (17/7/2025).



FOTO: ESTU/VEL

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: FARHAN/VEL

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Badan Legislasi DPR RI ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Senin (14/7/2025).

Telusuri Anjloknya Harga Singkong

Baleg DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Lampung dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam kunjungan tersebut, Baleg menelusuri penyebab anjloknya harga singkong yang dikeluhkan para petani. Hal ini dinilai sebagai bentuk nyata dari belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di Tanah Air.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa saat ini para petani singkong khususnya di Provinsi Lampung, tengah

menghadapi kesulitan akibat harga jual panen yang sangat rendah, dikarenakan banyaknya impor tapioka yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam upaya menelusuri akar persoalan tersebut, pihaknya telah mengantongi sejumlah temuan awal yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat khusus di Baleg.

“Salah satu penyebab utamanya adalah adanya ketidaksesuaian antara data hasil produksi yang dilaporkan dengan hasil produksi yang sesungguhnya. Data yang tidak akurat ini memengaruhi kebijakan impor, khususnya terkait kuota,” ujar Bob Hasan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik

Baleg ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Senin (14/7).

Tidak hanya terhadap pendataan saja yang kurang akurat, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti dampak lain yang bisa menjadi faktor meskipun banyaknya singkong yang diproduksi oleh para petani tetapi tetap saja masih dianggap kurang.

“Permasalahan kedua yaitu adanya impor tepung tapioka terutama dari Thailand, aktivitas dan produktivitas budidaya singkong yang belum optimal, fluktuasi harga beli singkong yang tidak stabil, dan kualitas (kadar pati) petani singkong. Dampak yang dirasakan oleh petani dengan adanya kendala tersebut di atas antara lain pendapatan menurun drastis, kesulitan menjual hasil panen pada saat pabrik tutup, dan sering terjadi aksi unjuk rasa yang berakibat bentrok dengan petugas aparat,” jelasnya. — **mfn/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Banggar DPR RI Bentuk Dua Panja



FOTO: DEP/VEL
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (15/7/2025).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara resmi membentuk dua Panitia Kerja (Panja).

Adapun dua Panja yang dibentuk adalah Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU, yang akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Said lantas meminta para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) untuk segera menyampaikan nama-nama anggotanya ke masing-masing sekretariat Banggar.

“Kami mohon para Kapoksi segera memasukkan nama-namanya ke Sekretariat (Banggar),” ujar Said saat menutup Rapat Kerja

Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran Wamenkeu serta pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Sebelum rapat ditutup, Anggota Banggar DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan interupsi terkait pentingnya keterkaitan antara laporan pertanggungjawaban APBN dengan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

“APBN 2024 ini adalah APBN terakhir dari periode RPJMN 2020–2024. Total APBN selama lima tahun itu lebih dari Rp14.000 triliun. Maka, pertanggungjawaban terhadap tujuh program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 juga perlu dilaporkan,” ujar Dolfie.

Dolfie yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI tersebut menekankan bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN bukan hanya berupa penyajian angka, melainkan juga harus disertai dengan laporan capaian terhadap indikator dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN. **pun/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Terima Kunjungan CDA Kedubes Qatar



FOTO: JAKA/VEL

Anggota BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo saat bertukar cinderamata usai menerima kunjungan CDA Kedutaan besar Qatar. Yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/7/2025).

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Qatar menerima kunjungan CDA Kedutaan besar Qatar. Yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/7). Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi antara kedua negara, khususnya di bidang investasi dan kerjasama pada bidang tenaga kerja.

Anggota BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo mengungkapkan bahwa Qatar menyampaikan keinginan kuat untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam sektor tenaga kerja. “Dalam pertemuan ini mereka menyampaikan ketertarikan dalam bidang

investasi dan tenaga kerja di Indonesia”, ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Qatar juga menyampaikan ketertarikan atas budaya di Indonesia. Menurut Bramantyo, Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda sehingga hal ini yang menarik minat Qatar. CDA Kedutaan Qatar juga berharap agar hubungan kedua negara semakin erat melalui peningkatan sektor investasi. Bramantyo menyambut baik berbagai tawaran kerja sama ini, namun menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait di dalam negeri.

“Ini menjadi momentum yang baik mereka tertarik dan ingin belajar lebih banyak dengan budaya di Indonesia. Dan kami berharap akan semakin banyak investasi dari Qatar untuk pembangunan Indonesia”, imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan harapan yang besar agar semakin banyak tenaga profesional ahli asal Indonesia yang bekerja di Qatar. “Karena kita tahu sekarang sudah banyak tenaga profesional kita yang bekerja di sana. Tentunya dengan kerjasama yang ditingkatkan akan semakin banyak lagi pekerja kita yang dikirim ke sana”, tambahnya.

tn/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid bersama tim mengunjungi Sekolah Rakyat Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso", Surakarta, Jawa Tengah, (16/7/2025). Ia mendorong seleksi ketat dan pengawasan langsung oleh Kementerian Sosial. Foto: Ulfi/vel



TNR
PARLEMEN

Perempuan Parlemen

SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID)



youtube @tvrparlemen



@tvrparlemen



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri